

**MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
DI SD NEGERI PANGGANG 01 JEPARA**

TESIS



Oleh :

RISMAN SUGONDO

NIM : Q 100050046
Program Studi : Magister Pendidikan
Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah dasar negeri yakni sebuah lembaga pendidikan dasar dituntut agar dapat melakukan reorientasi dan definisi eksistensinya agar sepadan dengan SD umum lain, dalam menyiapkan kompetensi sumber daya yang dimiliki, serta pengelolaan input, proses, dan outputnya. Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pakar menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini dimaksudkan agar dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi. Berbekal kemampuan tersebut diharapkan peserta didik mampu menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan berhasil guna (Mulyasa, 2002: 8).

Inovasi terhadap pendidikan selalu dilakukan pemerintah terutama terhadap materi pendidikan agar dapat menyentuh kebutuhan riil kehidupan yang sangat diperlukan oleh kemajuan peradapan manusia. Untuk itulah dikeluarkan kurikulum baru yakni kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, sekalipun

pelaksanaan secara riil baru dalam tahap persiapan.

Hasil analisa yang mendalam terhadap keadaan dan kebutuhan nyata peserta didik menunjukkan adanya pembaharuan kurikulum agar dapat menghadapi tantangan masa depan secara mandiri, kritis, rasional, dan kreatif (Boediono, 2002). Paling tidak terdapat tiga landasan teoritis yang mendasari kurikulum berbasis kompetensi (Mulyasa, 2002: 40), yaitu:

1. Adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individu;
2. Pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) atau belajar sebagai penguasaan (*learning for mastery*) adalah suatu falsafah pembelajaran yang mengatakan dengan sistem pembelajaran yang tepat, semua peserta didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik;
3. Pendefinisian kembali terhadap bakat;

Pembelajaran individual setiap peserta didik dapat belajar sendiri, sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing, serta tidak bergantung kepada orang lain. Untuk itu diperlukan pengaturan kelas yang fleksibel, baik sarana maupun waktu, karena dimungkinkan peserta didik dengan kecepatan yang berbeda, penggunaan alat yang berbeda, serta mempelajari bahan ajar yang berbeda pula.

Bloom (dalam Mulyasa, 2002: 41) mengatakan bahwa “sebagian besar peserta didik dapat menguasai apa yang di ajarkan kepadanya, dan tugas pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diberikan.”

Peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, jika diberikan waktu yang cukup. Maka perhatian harus dicurahkan kepada waktu yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Hal ini, perbedaan antara peserta didik

yang pandai dan yang kurang (bodoh) hanya terletak pada masalah waktu, peserta didik yang bodoh memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari sesuatu atau memecahkan masalah, sementara yang pandai lebih cepat melakukannya.

Perbaikan kurikulum harus mengacu kepada agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa karena perencanaan pembangunan pendidikan tidak akan pernah selesai dan berhenti di suatu titik. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan langkah pembaharuan dan pemberdayaan dalam rangka sistem pendidikan nasional.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara (Mulyasa, 2002: 8).

Di sisi yang lain, pembangunan pendidikan diarahkan pada sistem pendidikan yang arahnya pada desentralisasi pendidikan. Akibatnya sistem pendidikan yang bersifat sentralistis dan menekankan keseragaman atau *uniform* telah menyebabkan banyak penderitaan terhadap proses panjang perjalanan pendidikan Indonesia. Menunjukkan gejala-gejala penderitaan pendidikan, seperti pendidikan Indonesia sekarang tidak dapat dibanggakan karena sangat membelenggu sebagai akibat sistem yang sentralistis. Dampak lain adalah munculnya ketidakberdayaan akibat kehilangan kemerdekaan dalam komponen penyelenggaraan pendidikan, tidak mampu mengakomodasi pluralisme, dan diskriminatif.

KBK merupakan kurikulum yang didesain dengan didasarkan pada pengertian, struktur, dan pelaksanaan kurikulum. Ada empat pilar yang

menopang KBK, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (Boediono, 2002). Keempat pilar ini menjadi satu sistem KBK yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisah satu sama lain.

Pengertian kurikulum yang menjadi fokus adalah pengertian kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, komponen-komponen KBK, dan tujuan penyelenggara sekolah dalam kompetensi lulusan. Dalam struktur kurikulum berbasis kompetensi, fokus perhatian diarahkan pada pendidikan yang dimulai dari jenjang terendah yaitu Taman Kanak-kanak dan Roudhotul Ahfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Fokus perhatian dalam pelaksanaan KBK adalah pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran secara penilaian.

Di sisi lain rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan rendahnya mutu pendidikan. Adanya sinyalemen lebih dari tiga perempat TKI yang dikirim ke Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi hanya berkelas pembantu rumah tangga, buruh bangunan, buruh perkebunan, sopir, dan tukang kayu.

Kualitas pengetahuan mereka yang rendah dan ditambah minimnya kemampuan berbahasa Inggris menyebabkan para pekerja itu hanya berada di level pembantu rumah tangga, buruh, dan tukang. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas pendidikan kita rendah, sehingga menyebabkan bangsa

Indonesia semakin terpuruk dalam krisis multidimensional. Oleh karena itu diupayakan peningkatan mutu pendidikan baik secara formal maupun non formal dalam rangka mencetak kualitas sumberdaya manusia yang kualitas.

Salah satu peningkatan mutu dengan cara pengembangan kurikulum, dimana kurikulum merupakan sebuah sarana atau alat dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kunci utama untuk mencapai keberhasilan ujian sekolah terletak pada kurikulum, yang merupakan jantung dalam proses pendidikan sebagaimana pendapat (Sukmadinata dalam Mulyasa, 2002: 24) yang mengemukakan bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan di sekolah, kurikulum mengarah segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya pendidikan.

Sebagai upaya pengembangan kurikulum, pemerintah berusaha melakukan penyempurnaan kurikulum menjadi kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal yang disampaikan (Karim, 2002: 1) secara yuridis perlunya penyempurnaan kurikulum 1994 dan suplemennya termaktub dalam GBHN tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam bidang pendidikan perlu melakukan pembaharuan kurikulum, berupa deversifikasi jenis secara profesional. Untuk proses implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada jenjang sekolah tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada banyak unsur yang sangat berpengaruh secara signifikan, dalam hal ini akan dikaji pada sisi kesiapan sekolah dasar negeri dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Menurut Mulyasa (2002: 20), manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “*school-based management*”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu bentuk administrasi pendidikan di mana sekolah menjadi unit pertama dalam pengambilan keputusan (Depdiknas, 2006: 2).

Keterlibatan guru dan *steackholders* dalam pengambilan keputusan-keputusan sekolah juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolah yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin dan untuk mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam tujuan utama dimunculkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah mendirikan dan memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sesuai dengan kondisi lingkungan. Pemberian wewenang kepada sekolah diharapkan dapat mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasi. Di samping lulusan yang kompeten, peningkatan mutu dan Kurikulum Berbasis

Kompetensi antara lain akan diperoleh melalui reformasi sekolah (*school reform*), yang ditandai dengan dunia industri, kelenturan pengelola sekolah, peningkatan profesional guru adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan budaya mutu dalam suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan akan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kurikulum Berbasis Kompetensi memberi peluang bagi guru dan pengelola sekolah untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dan pengembangan kurikulum mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokrasi dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru dan petugas lainnya yang ada dilingkungan sekolah. Sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil (*out put*) dan dampak (*out come*), serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan secara menyeluruh (*total quality*), dan menciptakan proses perbaikan yang berkesinambungan (*continues improvement*), karena perbaikan tak kenal kata berhenti.

Karena kurikulum yang ditawarkan merupakan bentuk operasional desentralisasi pendidikan yang akan memberikan wawasan baru terhadap

sistem yang sedang berjalan selama ini, maka kebaruan ini harus diwaspadai dengan mengkaji beberapa sumber berbagai pihak terutama pada pelaksanaan dan calon pelaksanaan di lapangan, agar tidak salah tafsir dan salah kaprah dalam penerapannya. Faktor lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kesiapan aparat pelaksanaannya. Kesiapan ini juga mengangkat kemampuan dalam mengajukan argumentasi, rasionalisasi, dan berbagai sudut pandang untuk mendukung perlunya diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan kajian dan penelitian tentang kesiapan-kesiapan apa saja yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat berorientasi pada hasil (*out put*), dan dampak (*out come*), serta melakukan penelitian, pengawasan, dan pemantauan untuk menjamin mutu secara menyeluruh (*total quality*), dan menciptakan proses perbaikan yang berkesinambungan (*continues improvement*), karena perbaikan tak kenal kata berhenti.

Sosialisasi kurikulum berbasis kompetensi di SD Negeri 01 Panggang Kecamatan Jepara telah dilaksanakan tahun ajaran 2004/2005 mulai dari kelas II dan IV semester I. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran penulis, hingga sejauhmana kemampuan Sekolah Dasar Negeri 01 Panggang Kecamatan Jepara dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi tersebut.

B. Fokus

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, berikut ini peneliti ingin mengungkapkan fokus utama sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dalam KBK di SD Negeri 01 Panggang Jepara?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran KBK di SD Negeri 01 Panggang Jepara?
3. Bagaimana evaluasi dan analisis dalam pembelajaran KBK di SD Negeri 01 Panggang Jepara?
4. Bagaimana tindak lanjut pembelajaran KBK di SD Negeri 01 Panggang Jepara?
5. Bagaimana supervise penyampaian perencanaan dan pelaksanaan KBK?

C. Tujuan

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pembelajaran dalam implementasi KBK di SD Negeri Panggang 01 Jepara.

1. Manajemen yang diteliti dalam meningkatkan kualitas pengajaran, yaitu:
 - a. Perencanaan pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran;
 - c. Evaluasi dan analisis pembelajaran;
 - d. Tindak lanjut pembelajaran KBK;
 - e. Supervisi penyampaian perencanaan dan pelaksanaan KBK.

2. Memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan di sampaikan kepada peserta didik, sesuai dengan kondisi lingkungan.

D. Manfaat

1. Manfaat Akademik

Kegunaan penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan ilmiah karena akan memberi sumbangan dalam membangun konsep-konsep kesiapan pelaksanaan KBK. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan pada kesiapan pelaksanaan KBK di sekolah dasar secara dini. Temuan tersebut berupa analisis, evaluasi, kendala-kendala yang ada, dan faktor yang mendukung keberhasilan yang perlu disiapkan dalam melaksanakan KBK.

Hasil temuan tersebut sangat bermanfaat terutama bagi masukan sebelum KBK diterapkan disekolah dasar. Sebelum disosialisasikan, ada baiknya berbagai masukan dapat dipertimbangkan sehingga diperoleh hasil sebagaimana diharapkan.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini sangat berguna bagi pengelola sekolah dasar dalam melaksanakan KBK di lapangan terutama para guru. Diketemukannya kemungkinan kendala serta pendukung keberhasilan KBK, maka guru dan seluruh komponen sekolah akan melaksanakan KBK dengan optimal.

E. Definisi Istilah

1. Perencanaan pembelajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik–teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori–teori konstruktif terhadap solusi dan problem–problem pengajaran;
2. Perencanaan pembelajaran suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber–sumber dan prosedur–prosedur untuk menggerakkan pembelajaran;
3. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses adalah pengembangan pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus atas dasar teori–teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran.
4. Manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu di selenggarakan dan diawasi.
5. Kurikulum berbasis kompetensi adalah salah satu upaya pemerintah untuk men capai keunggulan masyarakat bangsa dalam pengawasan ilmu dan teknologi seperti digariskan dalam haluan negara.